

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Di bawah kepemimpinan Habyarimana, propaganda kebencian terhadap etnis Tutsi dimulai. Melalui serangkaian kebijakan, pemerintah menolak kembalinya orang-orang Tutsi ke Rwanda. Hal ini kemudian memicu kemarahan RPF yang berujung pada aksi serangan militer pada tahun 1990 untuk menurunkan Habyarimana dari jabatannya. Gagal, aksi ini mampu dibendung oleh tentara Rwanda yang kemudian berbalik menyerang. Berbagai tindak kekerasan kerap terjadi sampai insiden jatuhnya pesawat yang membawa Presiden Habyarimana dan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira. Saat itu, radio mulai menyiarkan ujaran kebencian guna memobilisasi ekstrimis Hutu dalam misi genosida. Aksi yang berlangsung selama 100 hari itu menewaskan 800.000 korban jiwa yang mayoritas adalah etnis Tutsi.

PBB yang telah terlebih dahulu mengirimkan pasukannya, UNAMIR, seolah sia-sia karena keterbatasan mandat yang mereka miliki. Penempatan pasukan penjaga perdamaian di Rwanda dilihat kurang tepat karena tugas yang diembannya tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Rwanda, khususnya etnis Tutsi. Hal ini disebabkan oleh kelambanan PBB dalam menganalisa situasi yang terjadi. Pergerakan ekstrimis Hutu yang sangat terstruktur dan minimnya informasi terkait rencana pembunuhan massal ini membuat PBB terlambat memutuskan tindakan yang harus diambil.

Dalam menjalankan misinya, PBB juga membutuhkan dukungan dari negara-negara. Sebagai satu-satunya pemangku kekuatan global, Amerika Serikat tidak menunjukkan respons yang diharapkan dan gagal dalam menggerakkan komunitas internasional. Di bawah pemerintahan Clinton, Washington bersikap skeptis. Kepentingan nasional, *Somalian Syndrom* hingga penolakan terhadap istilah genosida menjadi alasan Amerika Serikat untuk tidak terlibat dalam persoalan Rwanda. Sikap tidak acuh Amerika Serikat tentu turut mempengaruhi keberhasilan PBB dan pola interaksi negara dalam menanggapi isu yang berkembang. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan dan kapabilitas AS memiliki peran penting dalam politik internasional.

Kegagalan PBB dan Amerika Serikat dalam merespons aksi genosida di Rwanda menjadi bukti nyata rendahnya perhatian masyarakat internasional terhadap genosida. Selain itu, rasa ketidakpedulian menjadi akar dari krisis kemanusiaan yang melibatkan pelanggaran HAM dan berdampak pada keamanan global. Pasca Rwanda 1994, komunitas internasional mulai menyadari bahwa kita bertanggung jawab untuk saling melindungi. Melalui PBB, tercetus komitmen *Responsibility to Protect*, serta peningkatan operasi pemeliharaan perdamaian menjadi *peace enforcement*.

Hingga saat ini, masih banyak dari masyarakat Rwanda yang belum lepas dari bayang-bayang kelamnya tahun 1994. Tindak kekerasan terhadap mereka yang berhasil bertahan, menyisakan luka sebagai saksi bisu kekejaman ekstrimis Hutu. Meski kini situasi dan kondisi di Rwanda sudah jauh membaik, genosida 1994 senantiasa menjadi bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan.

5.2 Saran

Untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa, kesadaran komunitas internasional terhadap isu humaniter perlu ditingkatkan. Berkenaan dengan isu Rwanda sendiri, Amerika Serikat dan PBB seharusnya mampu memainkan perannya dengan baik. Mengingat posisinya sebagai hegemoni, Amerika Serikat perlu memperhatikan dinamika politik internasional dan tidak semata-mata menguntungkan dirinya sendiri dalam merumuskan kebijakannya. Sedangkan PBB, harus mampu beradaptasi dengan isu yang sedang berlangsung yang dapat diwujudkan melalui reformasi struktur dan programnya. Kapabilitas yang dimiliki kedua aktor ini perlu diproyeksikan dengan tepat untuk mendukung kestabilan politik dan keamanan global.

Selain AS dan PBB, penulis melihat sebagai bagian dari komunitas internasional, peranan media menjadi krusial untuk memobilisasi perhatian masyarakat global. Oleh karena itu, di era modern ini, eksistensi media perlu dimaksimalkan sebagai sumber informasi yang objektif dan kredibel.